

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, teknologi informasi (TI) memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan maupun pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan *e-government* di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* (Sofa dkk., 2020).

Tata kelola Teknologi Informasi (TI) termasuk aspek kepemimpinan, struktur, dan proses dalam organisasi yang berperan penting untuk memastikan pemanfaatan TI secara optimal (Sukanto dkk., 2021). Keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan digital (*e-governance*) sangat bergantung pada seberapa efektif tata kelola TI dijalankan. Kesesuaian antara penggunaan TI dengan strategi bisnis serta tujuan organisasi dapat tercapai melalui manajemen TI yang terarah dan efektif (Wijaya dkk., 2020).

Dinas Perhubungan merupakan pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perhubungan (Puspita & Adiarto, 2019). Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada awalnya merupakan Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Kantor tersebut berubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun

2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2009 Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berubah menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berubah kembali menjadi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saeful Ahyar selaku Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa Dinas Perhubungan saat ini belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang TI. Permasalahan lainnya yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan yaitu, kurangnya ide-ide baru dan inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis untuk instansi. Adanya keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan teknologi informasi, salah satunya melakukan perbaikan terhadap situs web yang hingga saat ini masih belum dapat diakses secara optimal. Selain permasalahan yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya belum pernah melakukan pengukuran *Capability Level* untuk analisis tata kelola dan manajemen TI.

Sangat penting bagi suatu organisasi untuk menerapkan kerangka kerja sebagai pedoman oleh pihak manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi TI, dengan menerapkan suatu kerangka kerja maka memungkinkan untuk dapat mencapai tahapan tata kelola TI yang baik (Masitah, 2017). Keberadaan tata kelola TI, menciptakan semua faktor dan dimensi yang berhubungan dengan penggunaan TI dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau instansi (Prandana dkk., 2019).

Terdapat beberapa kerangka kerja yang mampu dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Teknologi Informasi (TI) dalam sebuah organisasi, seperti COBIT, ITIL, dan ISO 17799. Diantara ketiga kerangka kerja tersebut, COBIT memberikan serta menyediakan panduan umum tentang pengelolaan TI. COBIT sendiri telah mengalami pembaruan, mulai dari COBIT 1, hingga versi terbaru yaitu COBIT 2019. COBIT versi terbaru merupakan COBIT yang dikembangkan dan disempurnakan dari versi sebelumnya yaitu COBIT 5. Dikenal sebagai *framework* yang lebih luas dan fleksibel, COBIT 2019 hadir dengan berbagai pembaruan. Versi terbaru ini tidak hanya memperbaiki struktur dan kontennya, tetapi juga menambahkan inovasi baru seperti faktor desain yang membantu dalam meningkatkan sistem tata kelola TI di perusahaan. (Sukanto dkk., 2021).

COBIT 2019 memiliki lebih banyak proses namun dari segi prinsip COBIT 2019 lebih bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman (Bayastura dkk., 2021). *Framework* COBIT 2019 dipilih karena *framework* tersebut menerapkan beberapa model umum yang ditetapkan dalam mengatur proses dan memelihara kredibilitas (Sukanto dkk., 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi (TI) Menggunakan COBIT 2019 Domain APO04, APO07, dan BAI08 (Studi Kasus: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya)”**. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan guna membantu dalam penyusunan rencana

TI bagi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sehingga dapat mencapai *good governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hasil dari pengukuran *Capability Level* kondisi saat ini (*As-is*) dan kondisi yang diharapkan (*To-be*) di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara kondisi saat ini (*As-is*) dengan kondisi yang diharapkan (*To-be*) di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana menyusun rekomendasi untuk perbaikan yang tepat pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar mencapai *good governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengukur *Capability Level* tata kelola TI kondisi saat ini (*As-is*) dan kondisi yang diharapkan (*To-be*) di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
2. Mengukur kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara kondisi saat ini (*As-is*) dengan kondisi yang diharapkan (*To-be*) di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya rekomendasi tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berdasarkan COBIT 2019 agar mencapai *good governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat bagi Peneliti
 - a. Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengukur *Capability Level* tata kelola TI terhadap instansi dalam mengembangkan tata kelola TI guna mendukung pencapaian tujuan bisnis.
 - b. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Komputer.
2. Manfaat bagi Dinas Perhubungan
 - a. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat mengetahui domain yang menjadi kepentingan untuk dianalisis.
 - b. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat mengetahui *Capability Level* tata kelola TI saat ini (*As-is*) dan kondisi yang diharapkan (*To-be*), serta dapat mengetahui kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara kondisi saat ini (*As-is*) dengan kondisi yang diharapkan (*To-be*).
 - c. Rekomendasi tata kelola TI yang dirancang, diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana TI Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar mencapai *good governance*.
3. Manfaat bagi Universitas
 - a. Memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang tata kelola TI.

- b. Menambah wawasan baru mengenai tata kelola dan manajemen TI untuk para pembaca.

1.5 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini, sehingga dapat dilakukan secara spesifik. Batasan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. *Framework* yang digunakan dalam penelitian ini adalah COBIT 2019.
2. Penentuan domain penelitian ini menggunakan identifikasi *Enterprise Goals*, *Alignment Goals*, *Governance Management Objective*, dan *Design Factor Toolkit*.
3. Pemilihan responden untuk pengisian kuesioner dipilih melalui analisis RACI *Chart*.
4. Domain yang dipilih untuk dianalisis adalah domain yang memiliki kepentingan mencapai *Capability Level 4* dengan target nilai ≥ 75 .